

SISTEM PENGUPAHAN DAN PEMBAGIAN KERJA PEREMPUAN BURUH BATIK BERBASIS *PUTTING OUT* *SYSTEM* DI KOTA PEKALONGAN (Proses dan Implikasi Marginalisasi Terhadap Perempuan Buruh Batik)

Rita Rahmawati
Shinta Dewi Rismawati
Esti Zaduqisty
STAIN Pekalongan
rita_saif@yahoo.co.id

Abstract: This research was motivated by the rampant of batik female workers who worked with the Putting Out System (POS) and were marginalized in Pekalongan City. This study was aimed to answer the research questions: what was the marginalization form of women workers through the wage system and division of labor in the production chain based on POS was; the actors who were involved in the process; what factors caused it; and what was implications for women workers, their family and bosses inside production process as well as outside the production process. In-depth interview and observation were used to investigate data. Triangulation of data source and investigating method were also used to validate the investigated data. In addition, Interactive model was used to analyze. The results were: (1) the actors who played a role in the process of marginalization of women workers in Pekalongan batik is the boss, *makloon*, religious elite (*Kyai / Ustad - ah*), and the state; (2) the cause root of that marginalization was manipulated by patriarchal and capitalism ideology; and (3) the implication of that marginalization for woman workers inside production process was that they were positioned as a production machine to make a profit. While the implications outside the production process, they still lived in poverty.

Kata Kunci: Upah, Marginalisasi, Buruh, Perempuan

PENDAHULUAN

Kota Pekalongan yang selama ini dikenal dengan sebutan Kota Batik, bukan hanya sebagai label saja, akan tetapi industri perbatikan telah menjadi nafas bagi masyarakatnya, dengan melahirkan para pengusaha batik, baik berskala kecil, kecil menengah, menengah maupun

besar, yang semuanya tersebar hampir diseluruh kecamatan Kota Pekalongan. Menurut Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Pekalongan, jumlah pengusaha batik Kota Pekalongan yang terdaftar di kantor Disperindagkop dan UKM sebanyak 3406, dengan skala usaha kecil menengah, menengah maupun skala besar, sedangkan untuk skala kecil, bahkan skala kecil menengah juga masih banyak yang belum terdaftar karena belum memiliki ijin usaha. Di sisi lain, industri perbatikan juga telah membuat sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan, menggantungkan hidupnya pada sektor ini, dengan menjadi buruh atau tenaga kerja. Lebih spesifik lagi, industri batik di Kota Pekalongan hampir semuanya menggunakan sistem *Putting Out*, sehingga potensial untuk tumbuhnya pekerja perempuan atau dalam bahasa lokal disebut perempuan buruh batik.

Surtiyah (1997: 224-225) mengatakan bahwa *Putting Out Sistem* yaitu sistem untuk mengatur, mengendalikan dan memobilisasi proses produksi dan hubungan produksi dari bahan mentah menjadi barang jadi yang dilakukan di luar perusahaan. Pekerjaan dari perusahaan dibawa dan dikerjakan oleh pekerja ditempat yang dipilih sendiri, biasanya di rumah pekerja atau disekitar rumah pekerja. Dalam sistem ini, pekerja dikategorikan sebagai pekerja rumahan yaitu, tenaga kerja yang menerima pekerjaan dari pengusaha tanpa ikatan kerja formal, membawa dan mengerjakannya dirumah, tanpa supervisi, menyediakan sendiri fasilitas kerja, menanggung sendiri resiko produksi serta menerima upah kerja berdasarkan satuan output (borongan) menurut ukuran sang pengusaha.

Secara formal, jumlah perempuan buruh batik yang tersebar dihampir seluruh kecamatan kota Pekalongan terutama di kantong-kantong industri batik maupun dikantong pemukiman kumuh/miskin, tidak terdata di Badan Statistik (BPS) dan Dinsosnakertrans kota Pekalongan. Hal tersebut dikarenakan, mereka adalah pekerja informal. Meskipun demikian, dalam realitasnya jumlah perempuan buruh batik kota Pekalongan sangatlah banyak, bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pekerja buruh laki-laki di sektor yang sama.

Hal ini dibuktikan dari hasil observasi awal dan identifikasi data di lapangan, yaitu dari 15 (lima belas) juragan batik Kota Pekalongan yang kami datangi, semuanya menggunakan tenaga kerja perempuan, kecuali untuk jenis pekerjaan yang memang membutuhkan tenaga laki-laki. Jumlah perbandingan rata-rata tenaga kerja perempuan dan laki-laki per juragan adalah perempuan sebanyak 80% dan tenaga kerja laki-laki hanya 20%. Alasan para juragan menggunakan tenaga kerja perempuan

adalah, upahnya lebih murah dan mereka tidak suka protes. Selanjutnya menurut para juragan, upah murah bagi pekerja buruh perempuan terjadi karena, pekerjaan membatik tidak perlu skill, lebih banyak membutuhkan tangan perempuan dan tidak membutuhkan tenaga (fisik). Hal tersebut membuktikan bahwa, meskipun secara kuantitatif jumlah perempuan buruh batik lebih banyak dari laki-laki buruh batik, akan tetapi secara kualitatif, perempuan buruh batik dianggap lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan laki-laki buruh batik. Kondisi ini berimbas pada ketimpangan upah yang diterima buruh laki-laki dan perempuan. Realitas ketimpangan inilah yang akan diteliti dan dianalisis berdasarkan teori serta konsep tentang marginalisasi, sehingga ada relevansi dalam membangun struktur keilmuan berbasis realitas. Isu riset yang diteliti adalah :

1. Bagaimana bentuk proses peminggiran terhadap perempuan *Buruh* melalui Sistem Pengupahan dan Pembagian Kerja dalam mata rantai Produksi Batik Berbasis *Putting Out System*?. Siapa yang berperan dalam proses tersebut?.
2. Faktor apa saja yang menyebabkannya?
3. Bagaimana implikasi terhadap perempuan buruh, keluarganya dan juragan (pengusaha) dalam proses produksi maupun di luar proses produksi?

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Marginalisasi Perempuan Buruh Batik Pekalongan: Pelaku dan Bentuknya

Ada kesamaan dengan Mullaly dan Horton, marginalisasi dalam realitas perempuan *buruh* batik Pekalongan meskipun tidak terjadi secara alamiah ataupun keterpencilan geografis, akan tetapi dikreasikan oleh para pelaku yang memang mempunyai kepentingan sosial dan ekonomi terhadap realitas ini. Kepentingan sosial terkait dengan kultur budaya domonasi laki-laki dan kepentingan ekonomi terkait dengan pemupukan laba. Para pelaku yang berperan dalam proses peminggiran perempuan buruh batik di Gamer, antara lain: Juragan Bos (pengusaha), *makloon*, elite agama (Kyai/ Ustazd-ah), maupun negara. Marginalisasi yang dilakukan oleh pengusaha (juragan), dilakukan dengan cara memberikan jenis-jenis pekerjaan yang dikonstruksi identik dengan tangan perempuan, dianggap tidak memerlukan *skill* dan tenaga dan tentunya dengan upah lebih murah dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki. H. Muhajirin, Hj. Nurbaity dan Hj. Sulistyowati (Juragan bos), dengan nada

yang sama mengemukakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh para Perempuan Buruh sangat ringan sesuai dengan kodrat perempuan, jadi wajar kalau "imbalan" nya juga kecil . Para juragan memakai istilah "imbalan" bukan "upah", karena menurut para juragan pekerjaan mereka bukan pekerjaan yang seharusnya di upah dan disesuaikan dengan UMR, karena pekerjaan membuat bisa dilakukan di rumah dan merupakan pekerjaan sambilan. Bahkan para *makloon* di Gamer yang berhasil ditemui dengan nada yang sama juga mengatakan bahwa umumnya di sini upah perempuan memang segitu, berbeda dengan laki-laki. Kondisi demikian akhirnya, membuat para juragan bos dan *makloon* lebih menyukai mempekerjakan perempuan daripada laki-laki, kecuali untuk pekerjaan yang memang dengan terpaksa harus dikerjakan oleh kaum laki-laki. Tujuan pengusaha adalah untuk memupuk modal dengan tenaga murah sedangkan tujuan *makloon* untuk menambah pendapatan dari sisi upah borongan atas pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha (juragan besar).

Ada realitas menarik dari proses peminggiran perempuan *buruh* batik di Kota Pekalongan *dus* Gamer, yaitu peran Kyai/ Ustadz-ah terhadap proses peminggiran ini. Para Kyai/Ustadz-ah, di kota Pekalongan, sering melontarkan kalimat –kalimat yang menggiring kesadaran dan sikap pasrah perempuan *buruh*, terhadap realitas pekerjaan mereka dalam forum pengajian atau Majelis Ta'lim, yang *notabene* jamaahnya adalah perempuan. Lontaran Kyai/Ustadz-ah tersebut, mesti kontradiktif dengan misi Agama (Islam), akan tetapi mengandung keberpihakan pada kaum kapitalis (juragan), sekaligus merupakan skenario jitu atas peminggiran perempuan buruh. Ironisnya, kondisi tersebut dianggap wajar oleh perempuan buruh batik sendiri. Kentalnya keberagaman dan kepercayaan mereka pada figur Kyai/ustadz-ah, ditambah dengan kesadaran tradisional berbasis filosofi budaya Jawa, yaitu sikap pasrah (sabar, nrimo dan ikhlas) dan juga keyakinan akan takdir yang sudah mengejawantah dalam ruang-ruang kesadaran mereka, menjadi sasaran empuk kapitalis (juragan batik). Secara simultan kapitalis telah membentuk, memproduksi dan melakukan kontrol kesadaran dengan mengebiri potensi kesadaran kritis, daya korektif dan resistensi mereka melalui para Kyai/Ustadz-ah, yang *notabene* juga banyak yang menjadi juragan.

Sedangkan marginalisasi yang dilakukan oleh Negara, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, yaitu tidak adanya kebijakan atau peraturan hukum yang menyentuh mereka. Bahkan

pencanangan kota Pekalongan sebagai Kota Batik Dunia “*Pekalongan World’s City of Batik*”, sejak UNESCO menetapkan bahwa batik sebagai warisan budaya Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009, dan Batik menjadi potensi lokal yang mampu meningkatkan PAD Kota Pekalongan di satu sisi, akan tetapi di sisi lain tidak ada kebijakan yang menyentuh mengenai realitas keprihatinan perempuan *buruh*. Kenaikan UMR kota Pekalongan per April 2010. UMR di Kota Pekalongan sebelum ada kenaikan adalah Rp. 760.000 dan mulai Januari tahun 2011 per bulan adalah Rp. 980.000, sedangkan upah perempuan buruh batik kota Pekalongan, yang dulunya 1 hari Rp. 10.000- Rp. 12.500, jadi 1 bulan Rp. 10.000 x 26 hari= Rp.260.000 atau Rp. 12.500 x 26 hari= Rp. 325.000 per bulan. Mulai awal tahun 2012 ini naik menjadi Rp. 15.000 s/d 17.500, jadi per bulan Rp. 15.000x26= Rp. 390.000 dan Rp.17.500 x26= 455.000. Kenaikan upah perempuan buruh Gamer tersebut, terjadi bukan karena UMR Kota Pekalongan naik, akan tetapi karena naiknya kebutuhan pokok. Kenaikan UMR ternyata juga tidak berpengaruh terhadap upah perempuan buruh batik yang *notabene* dianggap bukan pekerja, karena pekerjaan mereka dilakukan di rumah sambil *nyambi* pekerjaan rumah tangga lainnya. Domestifikasi jenis pekerjaan yang berimplikasi pada upah yang rendah (30%) di bawah UMR Kota Pekalongan ini, merupakan realitas marginalisasi terhadap perempuan buruh Batik yang dilakukan oleh Negara *dus* Pemerintah Kota Pekalongan.

Pelaku marginalisasi terhadap perempuan buruh batik tampaknya tidak hanya dilakukan oleh keluarga, juragan, tokoh agama tetapi juga oleh negara yang direpresentasikan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Kondisi ini kian meneguhkan tesis dari Faqih (1999: 27) yang mengatakan bahwa marginalisasi adalah salah satu bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender yang senantiasa dialami oleh perempuan tidak lain adalah produk konstruksi social yang dilegitimasi oleh tradisi budaya, doktrin agama serta oleh negara.

Lebih lanjut bentuk-bentuk marginalisasi terhadap perempuan *buruh* batik dalam sistem produksi batik, terjadi mulai pengadaan bahan baku, proses produksi sampai dengan pemasaran, dimana produk siap dijual ke konsumen. Proses peminggiran dilakukan melalui pembagian kerja secara seksual dan juga perbedaan upah antara buruh *buruh* laki-laki dengan buruh *buruh* perempuan. Paparan dibawah ini adalah hasil analisis terhadap fenomena (skenario) bentuk-bentuk

marginalisasi yang dialami oleh perempuan buruh batik di Kota Pekalongan.

Bentuk-Bentuk Marginalisasi Melalui Sistem Pengupahan

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada: a) Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya. b) Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum regional (UMR). c) Produktivitas marginal tenaga kerja. d) Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha. e) Perbedaan jenis pekerjaan.

Upah bagi buruh batik di Kota Pekalongan dikenal dengan istilah *pocoan* yang dibayarkan oleh juragan cilik dan/atau bos cilik kepada buruhnya atau oleh juragan gede/bos besar kepada bos kecil (Maklon) maupun langsung kepada buruhnya, yang biasanya diterimakan pembayaran atau *pocoan*-nya pada setiap hari Kamis sore. Pada hari Kamis sore ini juragan kecil dan/atau buruh akan datang kepada juragan bos/juragan besar untuk mengembalikan buruh yang dibawanya sekaligus meminta *pocoan*. Untuk selanjutnya juragan kecil/bos cilik ini akan membayar *pocoan* kepada buruhnya pada malam harinya atau pada hari Jum'at pagi. Pada umumnya urusan *pocoan* ini harus terselesaikan pada hari Jum'at dalam setiap minggunya, meskipun kadang juragan bos/juragan besar belum atau tidak membayar penuh upah atau *pocoan* ini kepada juragan kecil/bos cilik namun upah buruh tetap harus terbayar meski juragan kecil/bos cilik harus mengeluarkan uang sendiri. Sistem pengupahan buruh batik di kota Pekalongan, meliputi:

a. Upah Harian (Pocokan)

Sistem penghitungan pengupahan yang didasarkan pada upah harian biasanya diberlakukan bagi bidang tertentu dalam proses produksi batik seperti kuli keceh (bagian ngerek, nglorod, pencucian, penjemuran, dan pengeringan), tukang nyolet, nyemok dan nyinar (bagian pemberi pewarnaan pada motif-motif tertentu pada kain batik seperti bunga, daun dan binatang), dan laskar pelangi (pemberian warna dasar kain batik dengan menggoreskan spons dan obat warna warni) serta ngeces. demikian juga halnya dengan *nge_cap* meskipun ini jarang, akan tetapi ada juga yang menerapkan sistem harian yakni dengan upah perharinya Rp. 35.000,- (Tiga puluh

lima ribu rupiah) sebagai upah standart harian bagi mereka yang sudah berpengalaman dan cepat dalam menge-cap. Betapapun sistem penghitungan pengupahan ini didasarkan pada upah harian, namun pada umumnya untuk pembayaran pocoan diberikan seminggu sekali pada setiap hari Kamis sore/malam atau Jum'at pagi.

b. Upah Menurut Satuan Hasil

Pada umumnya upah yang diberikan kepada buruh atau pekerja dalam perbatikan ini didasarkan pada seberapa banyak hasil yang telah dikerjakan oleh buruh, yang biasanya dihitung dengan ukuran kodi yakni 20 lembar/potong kain. Upah menurut satuan hasil ini bisa dikatakan berlaku bagi setiap bagian dalam semua pekerjaan proses pembuatan batik, mulai dari: 1). *Meng-cap*. Tarif perkodi untuk meng-cap ini tidaklah sama, tergantung dari banyak sedikitnya motif dan macamnya canting, banyak sedikitnya yang harus di-cap, dan panjang pendeknya kain yang akan di-cap. 2). *Mbatik wedok* (Membatik yang dikerjakan oleh perempuan), meliputi: *Mengelengreng atau molo, isen-isen, nyumik-i, nembok, dan nonyok*, kegiatan di atas sistem pengupahannya tergantung dari berapa potong kemampuan pembatik dapat menyelesaikan pekerjaannya.

c. Upah Borongan

Sistem pembayaran upah ini didasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Dalam bidang perbatikan kesepakatan ini biasanya dilakukan oleh Juragan bos kepada juragan kecil (makloon) atau dilakuan antar sesama makloon. Upah dengan sistem borongan ini di kalangan usaha perbatikan dianggap sama dengan upah berdasar hasil pekerjaannya. Upah berdasar sistem borongan bisa ditemukan dalam jenis pekerjaan : 1). *Mbabar*. 2). *Nyolori-Nyolet-Nyemok-Nyinar* dan Laskar Pelangi; dan 3). *Mengelengreng dan Isen-isen*.

Bentuk-Bentuk Marginalisasi Melalui Pembagian Kerja Secara Seksual.

Mata rantai produksi batik, merupakan rangkaian proses kerja mulai dari pengadaan bahan baku batik atau mori sampai dengan pemasaran produk jadi untuk dijual ke konsumen. Dalam mata rantai produksi ini, hubungan yang dijalin oleh para pengusaha tidak hanya dengan para mitra usaha (penyedia bahan baku, sesama pedagang dan pengusaha), akan tetapi lebih banyak berkuat dengan para buruh, baik

buruh laki-laki maupun buruh perempuan, congok bahkan dengan para konsumen dan penyedia modal (Bank atau penyedia dana lainnya). Untuk lebih jelasnya mata rantai produksi batik di Kota Pekalongan yang secara rinci menunjukkan perbedaan upah antara laki-laki dan buruh perempuan. Apabila dianalisis lagi, maka perbedaan upah tersebut sesungguhnya bermula dari adanya perbedaan jenis pekerjaan yang didasarkan pada jenis kelamin. Perbedaan jenis pekerjaan berdasarkan jenis kelamin ini sudah mulai terlihat dalam kegiatan a. dalam pengadaan bahan baku, b). proses produksi batik yaitu: perlekatan lilin (malam) batik, Pewarnaan batik dan Menghilangkan lilin (malam). Dalam proses produksi batik ini biasanya dimulai dari mori dipotong, mengetel, *ngelengreng, isen-isen, nyumik-i, nyolori-nyolet,-nyinar-nyemok, nembok, ngeyos, ngeces, ngobat, nglorod*, pencucian, hingga c). pemasaran produk batik

Bentuk-bentuk marginalisasi perempuan buruh batik yang bersumber dari perbedaan-stigmatisasi jenis pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, secara singkat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jenis Pekerjaan dan Pelaksanaannya

NO	JENIS PEKERJAAN	PELAKSANA			KETERANGAN
		L	P	L & P	
1.	Tahap Awal: a. Ngetel b. Memotong bahan	X	-	-	Dianggap pekerjaan berat Bisa keduanya, tapi lebih dominan laki-laki. Jika yg melakukan Perempuan bukan buruh melainkan dr keluarga juragan.
2.	Proses pematikan: a. Ngobat b. Ngelengreng	X	-	X	Masih menjadi domain pekerjaan laki-laki Tergantung macam batiknya, Kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Kalau laki-laki cenderung menggunakan canting cap (tinggal nempel)

	c. Isen-isen	-	X	X	Tergantung macam batiknya. Kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Kalau laki-laki menggunakan cap (tinggal menempel)
	d. Nyolori, Nyolet, Nyinar dan Nyemok.	-	X	X	Kebanyakan dikerjakan oleh perempuan, jika laki-laki cenderung masih belia-usia anak, sbg pekerja anak. Pada umumnya dikerjakan oleh perempuan
	e. Nembok-Nonyok	X	-	-	Dikerjakan oleh laki-laki, tinggal menempelkan cap ke atas kain.
	f. Ngenyos		X	-	Dilakukan oleh perempuan diperlukan teliti dan telaten.
	g. Ngeces	X		-	Dilakukan oleh Laki-laki dianggap sebagai pekerjaan berat untuk perempuan.
	h. Ngobat-Ngerek (Kuli Kecah)	X			Dilakukan oleh laki-laki. Dianggap sbg pekerjaan yang berat bagi perempuan
	i. Nglorod (Kuli Kecah)	X	-	-	Dilakukan oleh laki-laki krn Dianggap berat bagi perempuan
	j. Pencucian (Kuli Kecah)	X	-	-	Dilakukan oleh laki-laki Dianggap berat bagi perempuan
3.	Proses Penjahitan: a. Pematangan	X	-	-	Dilakukan oleh laki-laki karena tenaganya kuat,

					mengingat dalam memotong menggunakan mesin berat dan langsung memotong kain dalam jumlah yang banyak.
	b. Penjahitan	-	-	X	Bisa dilakukan oleh keduanya, selama mereka bisa.
	c. Pengobrasan	X	-	X	Bisa dilakukan oleh keduanya, selama mereka bisa. Hanya lebih dominan dikerjakan oleh laki-laki karena mesinnya besar.
	d. Pasang Kancing	-	-	X	Kalau dipasang secara manual tradisional kebanyakan dilakukan oleh Perempuan karena telaten, kalau pakai mesin banyak dilakukan oleh laki-laki.
	e. Pelabelan (Nembak-i)	-	X		Kebanyakan dikerjakan oleh perempuan.
4.	Pemasaran:				
	a. Pengemasan Per potong	-	X	X	Bisa dilakukan oleh keduanya, hanya kebanyakan dilakukan oleh buruh perempuan karena telaten.
	b. Pengemasan per karton atau karung (bal)	X	-	-	Dilakukan oleh laki-laki karena dibutuhkan tenaga yang kuat
	c. Penjaga pasar, Toko, Outlet, Showroom.	-	X	X	Kebanyakan dikerjakan oleh perempuan telaten, teliti dan rapi. Meski laki-laki juga bisa

d. Pengiriman barang	X	-	-	Dilakukan oleh laki-laki, karena harus dengan tenaga yang kuat untuk angkut-angkut
e. Congok (loper)	-	-	X	Bisa dilakukan oleh keduanya, hanya jangkauan wilayahnya pemasarannya untuk perempuan lebih membatasi diri dengan wilayah yang dekat-dekat saja.

Kondisi di atas kian menenguhkan bahwa perempuan buruh batik Kota Pekalongan mengalami 4 bentuk marginalisasi dalam versi tesis McEwen (1986: 22), yaitu: (1). Proses pengucilan, perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau jenis kerja tertentu yakni dalam tahap-tahap tertentu dalam proses batik mengukuhkan stigma feminisme batik, (2) Proses pergeseran perempuan ke pinggiran (margin) dari pasar tenaga kerja, berupa kecenderungan bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang tidak stabil, upahnya rendah, dinilai tidak atau kurang terampil yakni adanya anggapan bahwa buruh adalah pekerjaan sampingan sehingga upahnya rendah, (3) Proses feminisasi atau segregasi, pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu (feminisasi pekerjaan), atau pemisahan yang semata mata dilakukan oleh perempuan saja atau laki-laki saja yakni terlihat dominannya peran perempuan buruh batik dalam setiap proses produksi yang mengedepankan aspek stigma feminisme batik. (4) Proses ketimpangan ekonomi yang merujuk di antaranya perbedaan upah yakni adanya diskriminasi upah yang signifikan antara buruh laki-laki dan perempuan.

Mencari Akar Penyebab Marginalisasi Perempuan Buruh Batik Pekalongan

Marginalisasi terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender, tidak terjadi secara “alamiah”, namun karena sistem yang ada menginginkan hal ini terjadi. Akar marginalisasi terhadap perempuan lebih dikarenakan oleh adanya *sistem produksi kapitalis*. Sistem produksi kapitalis ini memunculkan budaya patriarki pada masyarakat, yang akhirnya berdampak pada ketidakadilan gender,

termasuk marginalisasi yang ada di dalamnya. Walby (1998: 20) mengatakan bahwa patriarki merupakan sistem terstruktur dan praktek social yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini ada dalam dua bentuk yakni :

1. *Private patriarki* (patriarki domestik) yakni yang menekankan kerja dalam rumah tangga sebagai stereotipe perempuan, dan
2. *Public patriarki* (patriarki publik) yakni yang menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja disektor public yang sarat dengan karakter keras penuh tantangan.

Konstruksi sosial yang diproduksi oleh sistem budaya yang patriarkhis, sebagaimana yang dikemukakan Walby (1998), ternyata juga telah terinternalisasi dan dijustifikasi oleh pemahaman dan penafsiran agama yang *bias* atau sengaja dibiarkan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu, bahkan negara yang kurang atau tidak berpihak pada kaum perempuan, ditambah dengan sistem ekonomi yang eksploitatif-kapitalistik, merupakan rangkaian akar yang menjadi penyebab marginalisasi terhadap kaum perempuan. Rangkaian tersebut menyebar secara bertahap dari masa ke masa menginternalisasi dalam *mind set* masyarakat dengan istitusinya, negara dengan aparat dan institusinya, perusahaan juga juragan bahkan pada diri perempuan itu sendiri.

Dalam konteks lokal Kota Pekalongan, marginalisasi terhadap perempuan buruh, juga tidak terjadi secara alamiah. Kulture patriarki dan pemahaman keagamaan yang *bias* atau sengaja dibiarkan oleh pelaku-pelaku yang berperan dalam proses peminggiran sebagaimana yang telah di paparkan di atas, serta adanya hegemoni sistem kapitalisme yang membelenggu pola pikir para juragan merupakan faktor penyebab dari semua ini. Antara faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan menguatkan, sehingga menjadi suatu lingkaran sistem yang saling terkait dan tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya, bahkan bersifat dialektis. Diantara faktor-faktor tersebut, yang menjadi basis utama atau akar penyebab utama dari marginalisasi perempuan buruh batik Pekalongan adalah kapitalisme. Kapitalis yang identik dengan “laki-laki” menyerang kaum perempuan yang dalam hal ini perempuan *buruh*, untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadikan perempuan *buruh* sebagai alat pemupuk modal dalam rangka memperoleh keuntungan yang besar di perusahaan mereka.

Sistem produksi kapitalis yang menyandarkan peran kaum pemodal (juragan batik) memposisikan kaum perempuan buruh sebagai pihak yang patut ditindas, dieksploitasi dengan cara memberikan upah rendah dan feminisasi pekerjaan. Ironisnya, penindasan yang dilakukan oleh para Juragan tersebut dianggap wajar oleh perempuan buruh itu sendiri. Alih-alih kultur patriarkhi dan pemahaman keagamaan yang sengaja dibiarkan oleh kaum kapitalis, telah berhasil merasuk dalam alam pikiran perempuan buruh. Sehingga ketika upah yang mereka terima tidak sebanding dengan modal dan tenaga yang mereka keluarkan, tidak dianggap oleh perempuan buruh sebagai sesuatu yang menyimpang, atau sebagai bentuk ketidakadilan. Duriyah dan Fatonah mengatakan, "*Imbalan yang diberikan oleh para juragan sudah layak karena umumnya memang segitu, kalau pingin dapat uang banyak harus rajin dan nurut sama juragan biar juragane seneng dan ngasih buruh banyak*" Lebih lanjut, menurut mereka yang dimaksud dengan *nurut* adalah tepat waktu dalam pengembalian buruh; hasil yang dikerjakan rapi, sesuai pesan juragan saat pengambilan barang buruh.

Kuatnya cengkeraman patriarkhi ini menyebabkan perempuan lebih banyak berada pada posisi marginal dan sub ordinat dalam budaya kerja maskulin, karena posisi ini dibentuk oleh ideology patriarkhi yang meneguhkan perempuan menjadi dominan di bidang yang memandang perempuan sebagai makhluk lemah telah menjadi ideology umum yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam tetapi juga menjadi cara pandang negara dalam melihat serta menempatkan perempuan. Fenomena ini pada akhirnya telah menyumbat kesadaran kritis perempuan buruh dan menjadikan mereka tidak pernah bisa berkulit terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang mereka terima. Sebagaimana yang diungkapkan Mb Puk dari Bendan. Bahkan kapitalis melalui sistem patriarkhi telah berhasil membelokan fakta tentang kekuatan dan kemampuan (*skill*) perempuan buruh terkait dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. *Mbatik wedok* (Membatik yang dikerjakan oleh perempuan), yang meliputi: *mengelengreng atau molo, isen-isen, nyumik-i, nembok, dan nonyok*, merupakan fakta adanya pembelokan kemampuan dan kekuatan perempuan buruh. Tujuan utama dari semua ini sebenarnya hanya satu, yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui tangan-tangan terampil perempuan buruh dengan segala inivasi dan kreasinya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa akar marginalisasi terhadap perempuan buruh batik di Kota Pekalongan semuanya

bermuara dari kentalnya budaya patriarki yang dilegitimasi oleh tafsir agama (oleh ulama-kyai), tradisi-budaya-filosofi Jawa (keluarga, juragan) dan kebijakan serta regulasi yang seksis (pemerintah kota).

Implikasi Marginalisasi Terhadap Perempuan Buruh, Juragan dan Keluarganya di dalam Maupun di luar Mata Rantai Produksi

Kehidupan perempuan *buruh* batik Pekalongan yang tidak lepas dari bangunan struktur dan kultur masyarakat, memang menempati posisi sebagai perempuan yang tidak menguntungkan. Upah rendah karena adanya stigma atas pekerjaan yang mereka lakukan dan yang dianggap bukan pekerjaan, akan tetapi dan hanya dianggap atau sengaja dianggap sebagai pekerjaan tambahan---meskipun hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga----, dianggap tidak membutuhkan *skill*, tenaga dan mudah mengerjakannya---- meski sebenarnya jauh lebih berat, karena membutuhkan ketelitian, kesabaran, ketahanan fisik tinggi dan butuh waktu lama, membutuhkan skill dan tidak mudah mengerjakannya bahkan rentan terhadap penyakit----, semakin mempertegas wajah keprihatinan perempuan buruh dari berbagai posisi dimanapun mereka berada.

Masih dalam wacana di atas, ironisnya perempuan buruh sendiri menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah dan wajar, sehingga mereka tidak pernah sadar kalau dieksploitasi, diskriminasi dan diperlakukan tidak adil oleh struktur dan kultur yang merupakan hasil skenario dari para juragan yang *notabene* kapitalis. Akibat yang terjadi selanjutnya dari semua itu adalah, wajah kemiskinan melekat dan tergambar jelas dalam relung-relung kehidupan keseharian mereka. “Wajah kemiskinan adalah wajah perempuan buruh”, menjadi ungkapan yang patut untuk menggambarkan realitas dari semua ini, meskipun mereka ikut membesarkan perusahaan bahkan sebagai aktor utama dalam perusahaan selama bertahun-tahun.

Fenomena sebgaimana yang dipaparkan tersebut di atas, semakin mengukuhkan tesis Edward yang mengatakan bahwa: Kapitalisme mengabaikan peran serta perempuan dalam proses penumpukan laba, meskipun perempuan memberikan kontribusinya (secara tidak langsung) yang berupa reproduksi dari daya pekerja. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam kapitalisme, perempuan dipinggirkan dari proses produksi karena apa yang mereka kerjakan tidak memberikan kontribusi langsung dalam akumulasi keuntungan bagi kapitalis”. (Marselina, 2001: 121). Lebih lanjut Sukarno mengatakan bahwa: Kapitalisme adalah stelsel (sistem)

pergaulan hidup, yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme adalah timbul dari cara produksi ini, yang menyebabkan *meerwaarde* (nilai tambah) tidak dinikmati oleh kaum buruh melainkan jatuh ke dalam tangannya kaum majikan. Kapitalisme, oleh karenanya pula, adalah menyebabkan kapitaal *accumulatie*, kapitaal *concentratie*, kapitaal *centralisatie*, dan *industrieeel reserve armee* (buruh pengangguran). Kapitalisme mempunyai arah kepada *Verelendung* (pemiskinan), yang menyebarkan kesengsaraan (Sukarno, 2012: 3).

Terhadap pertanyaan di atas, maka secara kasat mata memang benar batik mampu memberikan kesejahteraan terutama bagi pengusaha batik (juragan) dan secara makro memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional. Akan tetapi di sisi lain, kesejahteraan tersebut tidak sampai menyentuh aktor-aktor yang justru memberikan nilai lebih karena keahliannya mengoreskan malam pada selebar kain, yaitu perempuan *buruh*. Secara detail, implikasi marginalisasi dalam realitas mata rantai produksi maupun di luar mata rantai produksi batik Pekalongan, dapat dipetakan dalam uraian berikut ini.

1. Dalam Mata Rantai Produksi

Implikasi marginalisasi dalam mata rantai produksi terhadap perempuan buruh, terlihat pada pembagian jenis wilayah pekerjaan laki-laki buruh dan perempuan buruh, serta upah lebih rendah bagi perempuan buruh dibandingkan dengan laki-laki buruh, meski dengan jenis pekerjaan yang sama. Di sisi lain, implikasi adanya marginalisasi ini bagi juragan adalah peningkatan omset hasil produksi dengan tidak mengeluarkan modal begitu besar karena sudah ditekan dengan upah murah perempuan buruh. Membatik, yang sebenarnya merupakan keahlian (*skill*) yang tidak dimiliki oleh semua orang, tidak pernah dihargai oleh para juragan sebagai suatu keahlian, dengan tujuan akhir laba besar bagi perusahaan. Bahkan, ironis lagi inovasi dan kreatifitas perempuan buruh terkait dengan inovasi dan kreasi corak dan gambar batik, menjadi hak milik juragan dan dijadikan sebagai komoditas untuk keuntungan perusahaan.

2. Di luar Mata Rantai Produksi

Implikasi marginalisasi di luar mata rantai produksi terhadap perempuan buruh dan keluarganya adalah rendahnya tingkat

kesejahteraan mereka. Rendahnya kesejahteraan keluarga perempuan buruh batik Pekalongan, yang ditandai dengan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara layak apalagi pendidikan bagi anak-anak mereka, menjadikan adanya pelanggaran kemiskinan antar generasi. “*Anak buruh yo mesti dadi buruh*”, ungkapan ini melekat kuat dalam pola pikir keluarga perempuan buruh kota Pekalongan, sehingga dari generasi ke generasi perempuan buruh mewariskan pekerjaan bahkan pengabdian pada sang juragan kepada anak-anaknya. Misalnya, yang dialami oleh keluarga Mak yah dari Gamer, Kota Pekalongan. Orang tua Mak yah yang dulu mengabdikan pada keluarga Pengusaha Batik Mahkota Agung (H. Makrus), diteruskan oleh Mak yah dan sekarang juga oleh anak-anaknya.

Sistem kapitalis yang dengan sengaja membangun realitas jurang pembeda antara si kaya dan si miskin dan mengkonstruksi sebuah realitas, dengan slogan “*yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin*”. Sehingga marginalisasi yang dengan sengaja dikonstruksi oleh kaum kapitalis (juragan batik) berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan mereka dan keluarganya. Perbedaan yang cukup mencolok terkait dengan realitas kesejahteraan antara perempuan buruh batik dan keluarganya dengan para juragan dan keluarganya ditandai oleh, antara lain: rumah masing-masing; pakaian yang dipakai; perhiasan; kendaraan dan juga hal-hal lain yang terkait dengan materi lainnya.

Kenyataan yang dialami oleh perempuan buruh batik di Pekalongan kian meneguhkan tesis Walby yang mengatakan bahwa patriarkhi merupakan sistem terstruktur dan praktek social yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini ada dalam dua bentuk yakni: *Private patriarkhi* (patriarkhi domestik) yakni yang menekankan kerja dalam rumah tangga sebagai stereotipe perempuan, dan *Public patriarkhi* (patriarkhi publik) yakni yang menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja disektor public yang sarat dengan karakter keras penuh tantangan (Walby, 1998: 20). Dalam kondisi seperti ini maka bisa ditegaskan bahwa perempuan buruh batik masih dianggap sebagai warga negara kelas dua karena stigma negatif, diskriminasi serta marginalisasi yang dialami secara sekaligus. Realitas ini juga menguatkan tesis Simone de Beauvoir yang mengatakan bahwa

budaya patriarki memulai riwayat penindasannya terhadap perempuan dengan stigmatisasi negatif terhadap kebertubuhan perempuan. Unsur-unsur biologis pada tubuh perempuan dilekati dengan atribut-atribut patriarki dengan cara menegaskan bahwa tubuh perempuan adalah hambatan untuk melakukan aktualisasi diri. Perempuan dicitikan semata dalam fungsi biologisnya saja (Shirley, 2005: 34). Dengan cara demikian, tubuh kaum perempuan tak dapat lagi menjadi instrument untuk melakukan transendensi sehingga perempuan tak dapat memperluas dimensi subjektivitasnya kepada dunia dan lingkungannya kepada dunia dan lingkungan di sekitarnya. Tubuh yang sudah dilekati nilai-nilai patriarki ini kemudian dikukuhkan dalam proses sosialisasi serta diinternalisasikan melalui mitos yang ditebar ke berbagai pranata sosial, keluarga, sekolah, masyarakat bahkan negara. Stigma dari juragan-elite ulama-keluarga dan negara bahwa dalam tubuh perempuan dilabeli sifat yang pasrah, telaten, sabar, teliti, lemah dan lain-lain, telah menjadikan perempuan buruh batik sebagai warga kelas dua. Tubuhnya telah membelenggu pengakuan akan eksistensi perempuan buruh itu sendiri sebagai buruh sebagaimana buruh batik laki-laki.

Dengan posisi demikian maka implikasinya, perempuan buruh batik di Kota Pekalongan ternyata termarginalisasi baik di ranah domestik maupun ranah publik, sehingga hingga detik ini belenggu kemiskinan yang dikonstruksi oleh kultur dan struktur tetap menjerat perempuan buruh batik. Berangkat dari realitas di atas, dapat dikemukakan bahwa marginalisasi dan berbagai bentuk ketidakadilan perempuan, akan membawa dampak yang tidak pernah kunjung usai pada perempuan buruh batik yakni mereka tetap saja miskin. Sehingga drama nestapa kehidupan perempuan buruh batik kota Pekalongan tidak akan pernah berakhir selama dua pilar kultur maupun strukturnya tidak pernah berpihak pada kepentingan perempuan buruh batik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Marginalisasi dalam realitas perempuan *buruh* batik Pekalongan tidak terjadi secara alamiah, akan tetapi dikreasikan oleh para pelaku yang memang mempunyai kepentingan sosial dan ekonomi terhadap realitas ini. Kepentingan sosial terkait dengan kultur budaya domonasi laki-laki dan kepentingan ekonomi terkait dengan pemupukan laba. Para pelaku yang berperan dalam proses peminggiran perempuan buruh batik di Pekalongan, antara lain:

Juragan Bos (pengusaha), *makloon*, elite agama (Kyai/ Ustazd-ah), maupun negara. Sedangkan bentuk-bentuk marginalisasi terhadap perempuan *buruh* batik dalam mata rantai produksi batik, terjadi mulai pengadaan bahan baku, proses produksi sampai dengan pemasaran, dimana produk siap dijual ke konsumen. Proses peminggiran dilakukan melalui pembagian kerja secara seksual dan juga perbedaan upah antara buruh *buruh* laki-laki dengan buruh *buruh* perempuan.

2. Kulture patriarkhi dan pemahaman keagamaan yang *bias* atau sengaja *dibiaskan* oleh pelaku-pelaku yang berperan dalam proses peminggiran dan adanya hegemoni sistem kapitalisme yang membelenggu pola pikir para juragan merupakan faktor penyebab dari adanya marginalisasi perempuan buruh batik. Antara faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan menguatkan, sehingga menjadi suatu lingkaran sistem yang saling terkait dan tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya, bahkan bersifat dialektis. Diantara faktor-faktor tersebut, yang menjadi basis utama atau akar penyebab utama dari marginalisasi perempuan buruh batik Pekalongan adalah kapitalisme. Kapitalis yang identik dengan “laki-laki” menyerang kaum perempuan yang dalam hal ini perempuan *buruh*, untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadikan perempuan *buruh* sebagai alat pemupuk modal dalam rangka memperoleh keuntungan yang besar di perusahaan mereka.
3. Implikasi marginalisasi dalam mata rantai produksi terhadap perempuan buruh, terlihat pada pembagian jenis wilayah pekerjaan laki-laki buruh dan perempuan buruh, serta upah lebih rendah bagi perempuan buruh dibandingkan dengan laki-laki buruh, meski dengan jenis pekerjaan yang sama. Di sisi lain, implikasi adanya marginalisasi ini bagi juragan adalah peningkatan omset hasil produksi dengan tidak mengeluarkan modal begitu besar karena sudah ditekan dengan upah murah perempuan buruh. Sedangkan implikasi di luar mata rantai produksi terhadap perempuan buruh dan keluarganya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan mereka, sehingga terjadi pelanggaran kemiskinan antar generasi. Di sisi lain, bagi juragan dan keluarganya adalah sebaliknya, yaitu kesejahteraan mereka semakin meningkat.

Saran

1. Adanya kebijakan dan program – program dari pemerintah kota Pekalongan yang pro perempuan buruh, sehingga perbedaan upah yang mencolok dan pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin yang merugikan perempuan buruh bisa rubah dengan jaminan kepastian dan perlindungan dari kebijakan tersebut.
2. Adanya kesadaran bagi para pengusaha dan para pelaku yang berperan atas marginalisasi terhadap perempuan buruh melalui berbagai forum baik oleh LSM maupun lembaga yang konsern terhadap problem perempuan buruh.
3. Melakukan pendampingan pada para perempuan buruh untuk membangun kesadaran kritis melalui pendekatan kesetaraan gender dalam kerangka membangun kualitas hidup yang lebih baik bagi perempuan buruh sendiri dan keluarganya dan juga bagi anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baidawi, Zakiyudin. 1997. *Wacana Teologi Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barlah, Asma. 2007. *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, Yogyakarta
- Demartoto, Argyo. 2007. *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difable*, Surakarta, UNS Press.
- Faqih, Mansour. 2006. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Hunga, Ina. 2008. “Perempuan dalam Aktifitas Ekonomi Berbasis “Putting-Out” System (POS) (Kasus Pekerja Rumahan dalam Industri Mikro – Kecil - Menengah Jawa Tengah)”, *Proposal Penelitian Kementerian PP*.
- Lie, Shirley. 2005. *Pembebasan Tubuh Perempuan: Gugatan Etis Simone de Beauvoir terhadap Budaya Patriarki*. Jakarta: Grasindo.
- McEwen, Alison Scott. 1986. *Woman And Industrialisation: Examining the Female Marginalisation*. Thesis in the Journal Of Development Studies No. 22 (4).

- Milles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *An Expandedn Soucers Book : Qualitative Data Analylisis*. Sage Publications.
- Mosse. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurbayani, ETTY, dkk. 2010. *Sikap Dosen STAIN Samarinda Terhadap Relasi Gender*. Jurnal Vol II, No II Desember
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2009. “*Penelitian Berperspektif Gender*”. Makalah Pelatihan Lemlit UNS.
- Ollenburger, Jane O dan Moore, Helen A. 2002. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Paul, Horton B, dan Hunt L., Chester. 1993. *Sosiologi*. Edisi Keenam (Alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari), Penerbit Erlangga, Jakarta
- Reni, Anastasia. 2009. *Rekonstruksi Kelembagaan Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan Rektioaktif*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 1, UNDIP, Semarang
- Sahlin, Marshall dalam Siregar, Ashadi. 2006. *Analisis Dengan Prespektif Gender Atas Majalah Wanita Di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM
- SF. Berk dalam Stromberg dan Harkess. 1988. *Women Working*. Mountain View: CA Mayfield Press.
- Soekanto, Soeryono. 1986. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sofiani, Triana. 2006. Manifestasi Perlindungan Hukum Berkeadilan Gender bagi Perempuan Buruh Batik Berbasis dalam Hubungan Kerja. dalam *Jurnal Penelitian*. Pekalongan: P3M STAIN Pekalongan.
- Surtiyah, Ken, dkk. 1994. *Marginalisasi Pekerja Wanita Di Pedesaan (Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga Pangan Di Sulawesi Selatan)*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Surtiyah, Ken. 1997. Pengorbanan Wanita Pekerja Industri. dalam *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryani, Nanik. 2004. *Marginalisasi Pekerja Wanita Sektor Informal (Studi kasus pada pekerja wanita industri sandang yang berdomisili di Gunungpati Semarang)*, Semarang: FIS UNNES Press.
- Walby, Silvia. 1998. *Theorizing Patriarchy*. USA: Oxford Blackwell.
- www. [http:// repository.ipb.ac.id/handle/123456789/12268](http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/12268).
- www. [http:// i-lib.ngm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=7675..](http://i-lib.ngm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=7675..)
- www. <http://revuesocialisme.pagesperso-orange.fr/s8patriarcat>, ibid
- www. <http://revuesocialisme.pagesperso-orange.fr/s8patriarcat.html>